



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WILOPO UNTUNG HANDOYO**
2. Jabatan : **STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **756946**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/42 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 203.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B3W A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 45.294.032**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.128.294.032**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.128.294.032**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.